

## PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN, LPDS, DAN PDRB PADA BELANJA DAERAH SERTA DETEKSI ILUSI FISKAL

A. A. Putu Nandya Indah Pratami<sup>1</sup>  
A. A. N. B. Dwirandra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: nandyaindah@gmail.com/ telp: +6283114256767

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pendapatan asli daerah (yang diproksi dengan pajak daerah dan *HCT*), dana perimbangan (yang diproksi dengan *DAU*, *DAK* dan *DBH*), *LPDS* dan *PDRB* pada belanja daerah serta ada atau tidak adanya ilusi fiskal pada pendanaan belanja daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali pada tahun 2010-2014. Jumlah sampel yakni 45 diperoleh dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menemukan bahwa pajak daerah dan *DAU* berpengaruh positif dan signifikan pada belanja daerah, *LPDS* dan *PDRB* berpengaruh positif dan tidak signifikan pada belanja daerah, sedangkan *HCT*, *DAK* dan *DBH* berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak terjadi ilusi fiskal.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Ilusi Fiskal

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to obtain empirical evidence of the effect of local revenue (the proxy for local taxes and HCT), balancing fund (which is proxied by DAU, DAK and DBH), LPDS and PDRB at shopping areas and the presence or absence of a fiscal illusion on financing regional expenditure. The population in this study were 8 counties and 1 city in Bali in 2010-2014. The number of samples that 45 was obtained using the technique of saturated samples. Analysis of the data used in this research is multiple linear regression analysis. This study found that local taxes and DAU positive and significant impact on shopping areas, LPDS and PDRB has positive and not significant to shopping areas, while the HCT, DAK and DBH not significant and negative to shopping areas. In addition, the study also found that there is no fiscal illusion.*

**Keywords:** Local Revenue, Balancing Fund, Local Expenditure, Fiscal Illusion

## **PENDAHULUAN**

Eksplorasi penerimaan daerah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dapat dilihat dari kondisi pajak daerah. Hal tersebut dikarenakan pajak adalah sumber penerimaan daerah yang paling besar didalam pengumpulan PAD. Tanzi (1972) menyatakan bahwa kenaikan pajak akan meningkatkan kenaikan pengeluaran, melalui kenaikan pengeluaran tersebut selanjutnya akan meningkatkan pendapatan pajak pada periode berikutnya dan pendapatan daerah. Secara bertahap tingkat kemandirian daerah akan semakin tinggi melalui peningkatan pendapatan daerah. Penelitian yang dilakukan Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di bidang industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah.

Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam hal pengelolaan daerah secara mandiri, akan tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru dikarenakan tingkat kesiapan fiskal setiap daerah yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Nanga (2005) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Adi (2006) mengungkapkan bahwa masalah ketimpangan fiskal yang muncul dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, diatasi oleh pemerintah pusat dengan memberikan dana perimbangan. Dana perimbangan (transfer) ini terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Logan (1986) menyebutkan bahwa pemberian bantuan transfer bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, hal tersebut menyebabkan dalam periode mendatang bisa mengurangi transfer.

Ghamkar dan Oates (1996) menunjukkan fakta empirik bahwa peningkatan pendapatan sendiri (identik dengan PAD) didorong oleh pemberian transfer. Pemberian transfer mengakibatkan meningkatnya belanja layanan publik yang memberikan dampak pada pendapatan sendiri. Menurut Sidik, dkk. (2004) tujuan pemberian transfer ada lima, yaitu untuk pemerataan vertikal (*vertical equalization*), pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah, mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik, dan stabilisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Holtz-Eakin *et al.* (1985) menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat diantara belanja pemerintah daerah dengan transfer pemerintah pusat. Transfer yang diterima oleh pemerintah pusat lebih menentukan berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek. Nagathan dan Sivagnanam (1999), menjelaskan bahwa alokasi dana transfer di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia pada umumnya lebih didasarkan pada aspek pengeluaran pemerintah daerah, dan kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan potensi keuangan lokal. Akibatnya dari tahun ke tahun pemerintah daerah akan selalu menuntut dana transfer yang lebih besar lagi dari pusat dan menyampingkan usaha eksplorasi basis keuangan lokal sebagai sumber pendapatan.

Maimunah dalam Adi (2006) telah membuktikan bahwa terdapat perilaku asimetris yang ditunjukkan oleh pengaruh DAU pada PAD dan belanja daerah. Besarnya proporsi DAU memiliki pengaruh positif pada belanja daerah, namun didalam besarnya proporsi PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada

belanja daerah. Hal tersebut menjelaskan bahwa transfer pemerintah khususnya DAU sangat dominan didalam membiayai belanja daerah. Fenomena tersebut diindikasikan sebagai ilusi fiskal (*fiscal illusion*) oleh Dollery dan Worthington (1999).

Logikanya, dalam setiap penerimaan pemerintah harus memiliki dampak pada besaran pengeluaran sehingga semakin besar pengeluaran pemerintah maka pemerintah semestinya memperoleh manfaat dengan meningkatnya penerimaan pemerintah di masa yang akan datang, misalnya meningkatnya kontribusi pajak masyarakat. Hal tersebut mengartikan bahawa terdapat hubungan yang simetris diantara sisi penerimaan dengan pengeluaran pemerintah. Apabila dalam kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya (hubungan asimetris) maka bisa disebut terjadi ilusi fiskal, dikarenakan baik masyarakat ataupun pemerintah pusat tidak menyadari bahwa mereka berkontribusi (dana transfer ataupun pajak/retribusi daerah) yang lebih besar dari yang sesungguhnya dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ilusi fiskal terjadi karena adanya asimetri informasi (Hewitt, 1989).

Pemerintah pusat tidak memahami sepenuhnya bahwa kapasitas fiskal daerah dan situasi yang seperti ini dimanfaatkan oleh pihak daerah untuk dapat meningkatkan kebutuhan fiskalnya dalam rangka mendapat dana transfer yang lebih besar (khususnya DAU). Sejalan dengan Dollery dan Worthington (1996) dimana hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa terdapat keuntungan yang diperoleh pemerintah dengan melakukan tindakan ilusi fiskal melalui penurunan pendapatan pajak dan peningkatan belanja, sehingga mendapatkan transfer dalam

nilai yang lebih besar. Hasil penelitian Dollery dan Worthington (1996) mengindikasikan adanya asimetri informasi diantara pemerintah pusat dari pemerintah daerah. Hasil penelitian dari Gemmel *et al.* (1998) menunjukkan terjadinya peningkatan transfer pemerintah pusat yang signifikan, tetapi tidak diimbangi dengan penerimaan pendapatan sendiri.

Adi (2009) dalam penelitiannya membuktikan terdapat ilusi fiskal dalam APBD kabupaten dan kota se Jawa Tengah. Disisi pendapatan, ilusi fiskal terdeteksi dari adanya hubungan negatif antara belanja daerah dan ratio pendapatan yang digunakan untuk belanja dan pajak tidak langsung. Hal tersebut mengindikasikan penerimaan daerah tidak dimanfaatkan secara optimal, baik yang berasal dari transfer (DAU) ataupun dari penerimaan sendiri (PAD). Sebagaimana temuan Adi (2007), semakin meningkatnya peran DAU didalam pembiayaan mengindikasikan telah terjadi ilusi fiskal. Picur (2003) dalam penelitian yang dilakukannya di Kanada menunjukkan bahwa terdapat pemisahan pajak pemerintah federal dan belanja pemerintah daerah (*state/negara bagian*) yang dapat mengakibatkan persepsi tentang pengurangan pajak dan belanja pemerintah yang lebih tinggi. Minimalisasi kemungkinan terjadinya ilusi fiskal dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi belanja dapat dilakukan dengan adanya pemisahan pajak pemerintah federal dengan belanja pemerintah daerah.

Kecenderungan pemerintah daerah yang memanfaatkan dana transfer pemerintah pusat secara asimetris, berdampak negatif pada usaha peningkatan potensi daerah. Indikasi adanya perilaku menyimpang yang dilakukan pemerintah daerah terhadap transfer yang telah diberikan pemerintah pusat, diperkirakan

mempengaruhi usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui belanja merupakan hipotesis yang membutuhkan pembuktian empiris. Hal inilah yang membuat peneliti ingin mengetahui apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan produk domestik regional bruto berpengaruh pada belanja daerah serta mendeteksi terjadinya ilusi fiskal pada pendanaan belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah: apakah pendapatan asli daerah yang diproksi dengan pajak daerah dan *herfindahl concentration taxes* berpengaruh pada belanja daerah; apakah dana perimbangan yang diproksi dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh pada belanja daerah; apakah lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh pada belanja daerah; apakah produk domestik regional bruto berpengaruh pada belanja daerah; apakah terjadi ilusi fiskal pada pendanaan belanja daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui adanya pengaruh pendapatan asli daerah (yang diproksi dengan pajak daerah dan *herfindahl concentration taxes*), dana perimbangan (yang diproksi dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil), lain-lain pendapatan daerah yang sah, produk domestik regional bruto pada belanja daerah; serta terjadi atau tidaknya ilusi fiskal pada pendanaan belanja daerah. Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah agar dapat menambah wawasan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan keuangan pemerintah

daerah, khususnya mengenai teori-teori tentang ilusi fiskal pada pemerintah daerah. Kegunaan praktisnya adalah hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta undang-undang dan peraturan pemerintah yang menyertainya.

Landasan teori yang digunakan yaitu teori keagenan dan teori *fiscal federalism*. Teori keagenan menjelaskan hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga hubungan antara masyarakat (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat melimpahkan wewenang terhadap pemerintah daerah dalam mengatur secara mandiri segala bentuk urusan pemerintahan di dalam daerahnya, sehingga akibat dari pelimpahan wewenang, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang bertujuan membantu pemerintah daerah baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari ataupun memberi pelayanan publik yang lebih baik terhadap masyarakat. Sedangkan dalam hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat terlihat dari pemberian sumber daya berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya guna meningkatkan pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh masyarakat (prinsipal) kepada daerah. Selaku agen, sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk memberikan timbal balik kepada masyarakat (principal) dalam bentuk pengalokasian belanja daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan publik yang memadai. Dimana pemenuhan kebutuhan

publik tersebut didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Teori *fiscal federalism* menjelaskan tentang bagaimana hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Teori federalisme fiskal menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai dengan desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan otonomi daerah. Akai dan Sakata (2002) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat rendah. Dalam berbagai kajian tentang federalisme fiskal, teori *fiscal federalism* dapat dibagi menjadi dua perspektif yakni teori tradisional (*traditional theories*) dan teori perspektif baru (*new perspective theories*). Hayek (1945) mengemukakan bahwa teori tradisional menekankan keuntungan alokatif dari desentralisasi. Pandangan ini memiliki dua pendapat yang menekankan keuntungan alokatif desentralisasi. Pertama, tentang penggunaan *knowledge in society* yang menyiratkan proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan pemerintah pusat terkait kondisi daerah masing-masing. Kedua, Tiebout (1956) memperkenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah dan kompetisi antar daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan mereka. Menurut Maggi dan Ladurner (2009), teori perspektif baru lebih menekankan untuk melihat ke dalam setiap keputusan politik



yang diambil oleh pemerintah, bagaimana pemerintah (eksekutif dan legislatif) berperilaku, berperan dan berpikir beserta lembaga-lembaga mereka.

Siregar (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa pajak daerah dan *herfindahl concentration taxes* berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Begitu juga Rusydi (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa produk pajak daerah dan *herfindahl concentration taxes* berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Pendapatan asli daerah yang diproksi dengan pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
- H<sub>2</sub> : Pendapatan asli daerah yang diproksi dengan *herfindahl concentration taxes* berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Penelitian Harianto dan Adi (2007) memperoleh hasil bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nahlia (2014) menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja daerah. Putra (2015) pada penelitiannya memperoleh hasil bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan pada belanja daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>3</sub> : Dana perimbangan yang diproksi dengan dana alokasi umum berpengaruh positif pada belanja daerah.
- H<sub>4</sub> : Dana perimbangan yang diproksi dengan dana alokasi khusus berpengaruh positif pada belanja daerah.
- H<sub>5</sub> : Dana perimbangan yang diproksi dengan dana bagi hasil berpengaruh positif pada belanja daerah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah dan dana perimbangan,

yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki peranan yang cukup besar sebagai sumber pembiayaan daerah. Berdasarkan hubungan antar komponen pembentuk penerimaan daerah maka dapat dikatakan jika lain-lain pendapatan daerah yang sah naik, maka belanja daerah juga akan naik dan sebaliknya. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aramana (2011) yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>6</sub> : Lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif pada belanja daerah.

PDRB dan PAD memiliki hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD (Purbayu, 2005). Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Halim, 2001). Selanjutnya dengan peningkatan penerimaan daerah, akan digunakan untuk membiayai program-program pembangunan daerah. Karena peningkatan dari penerimaan daerah akan meningkatkan PDRB. Jadi, PDRB dan belanja daerah memiliki hubungan yang positif. Bila PDRB mengalami peningkatan maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Yunus (2015) yang memperoleh hasil bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan pada belanja daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>6</sub> : Produk domestik regional bruto berpengaruh positif pada belanja daerah.

Pada penelitiannya, Adi (2007) menemukan bahwa telah terjadi ilusi fiskal setelah diberlakukannya otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wuriasih (2013) yang membuktikan adanya ilusi fiskal dalam APBD Kabupaten se-Papua Barat. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusidy (2010) menemukan bahwa terdapat ilusi fiskal di dalam kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>8</sub> : Terjadi ilusi fiskal pada pendanaan belanja daerah.

#### **METODE PENELITIAN**

Lokasi atau ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah Kantor Biro Keuangan Provinsi Bali dan Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data angka-angka yang terdapat dalam laporan APBD dan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2010-2014 serta data kualitatif berupa gambaran umum Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan juga teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh dari instansi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dan Biro Keuangan Provinsi Bali sepanjang tahun 2010-2014.

Belanja daerah adalah variabel terikat dalam penelitian ini adalah. Sedangkan Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (yang diproksi dengan pajak daerah dan *herfindahl concentration taxes*), dana perimbangan (yang diproksi dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan

dana bagi hasil), lain-lain pendapatan daerah yang sah dan produk domestik regional bruto.

Populasi dalam penelitian ini adalah 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali pada tahun 2010-2014. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh dimana keseluruhan anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013:122). Maka, sampel yang digunakan adalah seluruh anggota populasi yaitu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel atau gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Jumlah sampel *cross section* pada penelitian ini adalah 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan *time series* sebanyak 5 tahun (2010 sampai dengan 2014), sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 45. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan. Data yang dikumpulkan melalui observasi non partisipan dengan cara melakukan pengamatan dan mencatat serta mempelajari laporan APBD dan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2010-2014.

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang akan dikerjakan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Program and Service Solution*). Uji asumsi klasik yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, diantaranya adalah: uji normalitas; uji multikolinearitas; uji autokorelasi; dan uji heterokedastisitas. Untuk menguji apakah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen maka dilakukan uji kelayakan model. Untuk dapat mengetahui seberapa besar variabel terikat bisa dijelaskan oleh variabel bebas dalam penelitian ini maka dilakukan uji koefisien determinasi. Untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan uji signifikansi parameter individual dan deteksi ilusi fiskal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif dapat informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yaitu jumlah amatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi, yang disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	45	0,442	3,276	1,06640	0,575753
<i>Herfindahl Concentration Taxes</i>	45	0,002	2,011	0,21429	0,440469
Dana Alokasi Umum	45	0,000	282,620	72,08822	55,191707
Dana Alokasi Khusus	45	0,132	0,796	0,42060	0,132747
Dana Bagi Hasil	45	0,000	0,067	0,03751	0,018379
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	45	0,017	0,187	0,04993	0,044812
Produk Domestik Regional Bruto	45	0,001	0,285	0,14089	0,075407
Belanja Daerah	45	1,040	7,171	3,19411	1,874316

Sumber: Data Sekunder, 2016

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat nilai minimum pajak adalah sebesar 0,442 dan nilai maximumnya adalah sebesar 3,276. *Mean* pajak daerah sebesar 1,06640 dan standar deviasi untuk pajak daerah yaitu 0,575753. Nilai minimum *herfindahl concentration taxes* adalah sebesar 0,002 dan nilai maximumnya adalah sebesar 2,011. *Mean herfindahl concentration taxes* sebesar 0,21429 dan standar deviasi untuk *herfindahl concentration taxes* yaitu 0,440469.

Nilai minimum dana alokasi umum adalah sebesar 0,000 dan nilai maximumnya adalah sebesar 282,620. *Mean* dana alokasi umum sebesar 72,08822 dan standar deviasi untuk dana alokasi umum yaitu 55,191707. Nilai minimum dana alokasi khusus adalah sebesar 0,132 dan nilai maximumnya adalah sebesar 0,796. *Mean* dana alokasi khusus sebesar 0,42060 dan standar deviasi untuk dana alokasi khusus yaitu 0,132747. Nilai minimum dana bagi hasil adalah sebesar 0,000 dan nilai maximumnya adalah sebesar 0,067. *Mean* dana bagi hasil sebesar 0,03751 dan standar deviasi untuk dana bagi hasil yaitu 0,018379.

Nilai minimum lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar 0,017 dan nilai maximumnya adalah sebesar 0,187. *Mean* lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,04993 dan standar deviasi lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu 0,044812. Nilai minimum produk domestik regional bruto adalah sebesar 0,001 dan nilai maximumnya adalah sebesar 0,285. *Mean* produk domestik regional bruto sebesar 0,14089 dan standar deviasi untuk produk domestik regional bruto yaitu 0,075407. Nilai minimum belanja daerah adalah sebesar 1,040 dan nilai maximumnya adalah sebesar 7,171. *Mean* belanja daerah sebesar 3,19411 dan standar deviasi untuk belanja daerah yaitu 1,874316.

Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian ketepatan model penelitian berupa uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residualnya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) yang

diperoleh hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,168. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara statistik nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 yang berarti data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bermakna antara setiap variabel bebas dalam suatu model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka model dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 10% dan tidak ada yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Pengujian ini dilakukan dengan uji *Durbin-Watson*. Nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh sebesar 1,962. Nilai  $d_U$  untuk jumlah sampel 45 dengan tujuh variabel bebas adalah 1,900 sehingga nilai  $4-d_U$  adalah sebesar 2,100. Nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,962 terletak di antara nilai  $d_U$  (1,900) dan  $4-d_U$  (2,100) yang merupakan daerah bebas autokorelasi. Hal ini berarti data penelitian tidak mengandung gejala autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah metode *Glejser*. Agar model

regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas, maka nilai signifikansi variabel bebas terhadap absolute residual harus lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolute residual lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Uji kelayakan model bertujuan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Kriteria pengujian ini adalah jika  $p\text{-value} < 0,05$  maka hipotesis alternatif diterima dan jika  $p\text{-value} > 0,05$  maka hipotesis alternatif ditolak. Hasil uji kelayakan model menunjukkan nilai  $p\text{-value}$  sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja daerah atau dapat dikatakan bahwa variabel pajak daerah, *herfindahl concentration taxes*, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu belanja daerah.

Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk menguku r seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan perubahan variabel terikatnya. Dalam penelitian ini koefisien determinasi dilihat melalui nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,975 yang memiliki arti bahwa 97,5% perubahan belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah, *herfindahl concentration taxes*, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan produk



domestik regional bruto, sedangkan sisanya sebesar 2,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan teknik estimasi yang digunakan untuk mencari persamaan regresi menggunakan metode kuadrat terkecil untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, *herfindahl concentration taxes*, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan produk domestik regional bruto dalam hubungannya dengan belanja daerah. Hasil pengujian disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,04333	0,070		0,621	0,538
Pajak Daerah	1,21057	0,058	0,926	20,733	0,000
<i>Herfindahl Concentration Taxes</i>	-0,00047	0,000	-0,045	-1,168	0,250
Dana Alokasi Umum	1,60888	0,181	0,371	8,872	0,000
Dana Alokasi Khusus	-1,08773	1,175	-0,035	-0,925	0,361
Dana Bagi Hasil	-0,24548	0,728	-0,019	-0,337	0,738
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,36984	0,218	0,048	1,697	0,098
Produk Domestik Regional Bruto	0,03819	0,024	0,124	1,614	0,115

Sumber: Data Sekunder, 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$BD = 0,04333 + 1,21057 PAD - 0,00047 HCT + 1,60888 DAU + 1,08773 DAK - 0,24548 DBH + 0,36984 LPDS + 0,03819 PDRB + \epsilon$$

Nilai konstanta 0,04333 menunjukkan bahwa apabila variabel pajak daerah, *herfindahl concentration taxes*, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan produk domestik

regional bruto sama dengan nol, maka pemerintah daerah masih dapat membiayai belanja daerahnya sebesar 0,04333 satuan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya penerimaan pinjaman (hutang) daerah dan pelunasan piutang daerah.

Nilai koefisien regresi pajak daerah ( $X_1$ ) sebesar 1,21057 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel pajak daerah ( $X_1$ ) terhadap variabel belanja daerah (Y) sebesar 1,21057. Artinya apabila pajak daerah ( $X_1$ ) naik sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka belanja daerah meningkat sebesar 1,21057 satuan.

Nilai koefisien regresi *herfindahl concentration taxes* ( $X_2$ ) sebesar -0,00047 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel *herfindahl concentration taxes* ( $X_2$ ) terhadap variabel belanja daerah (Y) sebesar 0,0007. Artinya apabila *herfindahl concentration taxes* ( $X_2$ ) naik sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka belanja daerah menurun sebesar 0,00047 satuan.

Nilai koefisien regresi dana alokasi umum ( $X_3$ ) sebesar 1,60888 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel dana alokasi umum ( $X_3$ ) terhadap variabel belanja daerah (Y) sebesar 1,60888. Artinya apabila dana alokasi umum ( $X_3$ ) naik sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka belanja daerah meningkat sebesar 1,60888 satuan.

Nilai koefisien regresi dana alokasi khusus ( $X_4$ ) sebesar -1,08773 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel dana alokasi khusus ( $X_4$ ) terhadap variabel belanja daerah (Y) sebesar 1,08773. Artinya apabila

dana alokasi khusus ( $X_4$ ) naik sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka belanja daerah menurun sebesar 1,08773 satuan.

Nilai koefisien regresi dana bagi hasil ( $X_5$ ) sebesar -0,24548 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel dana bagi hasil ( $X_5$ ) terhadap variabel belanja daerah ( $Y$ ) sebesar 0,24548. Artinya apabila dana bagi hasil ( $X_5$ ) naik sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka belanja daerah menurun sebesar 0,24548 satuan.

Nilai koefisien lain-lain pendapatan daerah yang sah ( $X_6$ ) sebesar 0,36984 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah ( $X_6$ ) terhadap variabel belanja daerah ( $Y$ ) sebesar 0,36984. Artinya apabila lain-lain pendapatan daerah yang sah ( $X_6$ ) naik sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka belanja daerah meningkat sebesar 0,36984 satuan.

Nilai koefisien produk domestik regional bruto ( $X_7$ ) sebesar 0,03819 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel produk domestik regional bruto ( $X_7$ ) terhadap variabel belanja daerah ( $Y$ ) sebesar 0,03819. Artinya apabila produk domestik regional bruto ( $X_7$ ) naik sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka belanja daerah meningkat sebesar 0,038 satuan.

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh hasil nilai signifikansi  $t$  untuk variabel pajak daerah sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat dibuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan pada belanja daerah sehingga  $H_1$  diterima. Berdasarkan Tabel 2 diperoleh hasil nilai signifikansi  $t$  untuk variabel *herfindahl*

*concentration taxes* sebesar 0,250 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat dibuktikan bahwa *herfindahl concentration taxes* tidak berpengaruh signifikan pada belanja daerah sehingga  $H_2$  ditolak.

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh hasil nilai signifikansi t untuk variabel dana alokasi umum sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat dibuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan pada belanja daerah sehingga  $H_3$  diterima. Berdasarkan Tabel 2 diperoleh hasil nilai signifikansi t untuk variabel dana alokasi khusus sebesar 0,361 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat dibuktikan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan pada belanja daerah sehingga  $H_4$  ditolak. Berdasarkan Tabel 2 diperoleh hasil nilai signifikansi t untuk variabel dana bagi hasil sebesar 0,738 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat dibuktikan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan pada belanja daerah sehingga  $H_5$  ditolak.

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh hasil nilai signifikansi t untuk variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,098 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat dibuktikan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak berpengaruh signifikan pada belanja daerah sehingga  $H_6$  ditolak. Berdasarkan Tabel 2 diperoleh hasil nilai signifikansi t untuk variabel produk domestik regional bruto sebesar 0,115 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat dibuktikan bahwa produk domestik regional bruto tidak berpengaruh signifikan pada belanja daerah sehingga  $H_7$  ditolak.

Hasil pengolahan data menunjukkan pajak daerah dan dana alokasi umum sama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, akan tetapi

nilai *standardized coefficients* yang didapat adalah nilai koefisien pajak daerah yakni sebesar 0,926 lebih besar dari nilai koefisien dana alokasi umum sebesar 0,371. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi ilusi fiskal, sehingga  $H_8$  ditolak.

Hasil pengolahan data menunjukkan pajak daerah memiliki signifikansi  $t$  sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 1,21057. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah yang diproksi dengan pajak daerah berpengaruh secara signifikan pada belanja daerah. Artinya bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) dapat diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pajak daerah yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi pula belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Semakin banyak pajak daerah yang diperoleh, semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya terutama untuk pelayanan publik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusydi (2010) yang menunjukkan hasil bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja daerah.

Hasil pengolahan data menunjukkan *herfindahl concentration taxes* memiliki signifikansi  $t$  sebesar 0,250 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar -0,00047. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah yang diproksi dengan *herfindahl concentration taxes* tidak berpengaruh secara signifikan pada belanja daerah. Artinya bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang ditolak. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh kecilnya proporsi pendapatan dari retribusi daerah terhadap total penerimaan daerah sehingga daya dorongnya kecil untuk pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh Alamri (2015) yang memperoleh hasil bahwa bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada belanja daerah.

Hasil pengolahan data menunjukkan dana alokasi umum memiliki signifikansi  $t$  sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 1,60888. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan yang diproksi dengan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan pada belanja daerah. Artinya bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) dapat diterima. Dana Alokasi Umum (DAU) ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dimanfaatkan oleh daerah dalam APBD untuk membiayai belanja gaji pada belanja langsung yang merupakan bagian dari belanja daerah, maka dari itu dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2012) yang memperoleh hasil bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan pada belanja daerah.

Hasil pengolahan data menunjukkan dana alokasi khusus memiliki signifikansi  $t$  sebesar 0,361 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar -1,08773. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan yang diproksi dengan dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan pada belanja daerah. Artinya bahwa hipotesis keempat ( $H_4$ ) ditolak. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kecilnya proporsi penerimaan dana alokasi khusus terhadap total penerimaan daerah sehingga daya dorongnya kecil untuk pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah. PP No. 55/2005 menyebutkan bahwa

besaran DAK dalam APBN ditentukan setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Alokasi DAK ini hanya merupakan residu, sebab besaran alokasi transfer lainnya (DAU dan DBH) sudah ditentukan persentasenya dalam undang-undang sehingga penetapannya akan didahulukan (Poesoro, 2008). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki I. P. (2015) yang memperoleh hasil bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan pada belanja daerah.

Hasil pengolahan data menunjukkan dana bagi hasil memiliki signifikansi  $t$  sebesar 0,738 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar -0,24548. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan yang diproksi dengan dana bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan pada belanja daerah. Artinya bahwa hipotesis kelima ( $H_5$ ) ditolak. Kondisi ini kemungkinan disebabkan karena kecilnya proporsi penerimaan dana bagi hasil terhadap total penerimaan daerah sehingga daya dorongnya kecil untuk pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah. DBH merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku. Secara garis besar, DBH terdiri dari DBH perpajakan dan DBH sumber daya alam (SDA). Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan meliputi pajak penghasilan PPh pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan SDA yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan

dan perikanan. Sedangkan dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tidak mempunyai sumber-sumber penerimaan SDA yang besar. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2012) yang memperoleh hasil bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan pada belanja daerah.

Hasil pengolahan data menunjukkan lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki signifikansi  $t$  sebesar 0,098 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,36984. Hal ini menunjukkan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak berpengaruh secara signifikan pada belanja daerah. Artinya bahwa hipotesis keenam ( $H_6$ ) ditolak. Hal ini kemungkinan terjadi karena proporsi pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total penerimaan daerah kecil, maka daya dorongnya kecil untuk mempengaruhi tingkat belanja daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2012) yang memperoleh hasil bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak berpengaruh signifikan pada belanja daerah.

Hasil pengolahan data menunjukkan produk domestik regional bruto memiliki signifikansi  $t$  sebesar 0,115 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,03819. Hal ini menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto tidak berpengaruh secara signifikan pada belanja daerah. Artinya bahwa hipotesis ketujuh ( $H_7$ ) ditolak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu memberikan pengaruh yang nyata pada alokasi belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil ini mengindikasikan bahwa anggaran belanja daerah belum mampu menjadi



pendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat dioptimalkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah pada masing-masing kabupaten/kota untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjiyanti (2015) yang memperoleh hasil bahwa produk domestik regional bruto berarah positif tapi tidak berpengaruh signifikan pada belanja daerah.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini, pajak daerah dan dana alokasi umum sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Akan tetapi, nilai *standardized coefficients* yang diperoleh variabel pajak daerah lebih besar daripada variabel dana alokasi umum, yakni 0,926 lebih besar daripada 0,371. Hal ini berarti tidak terjadi ilusi fiskal pada pendanaan belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam kurun waktu 2010-2014. Artinya bahwa dana perimbangan dari pemerintah pusat hanya berfungsi untuk membantu pemerintah daerah dalam menunjang pendapatan asli daerahnya atau dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sudah mandiri dilihat dari segi keuangan karena telah mampu mengelola pendapatan asli daerahnya dengan baik dan bergantung pada kemampuan keuangan daerah itu sendiri dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Pemerintah daerah tidak menggantungkan pendanaan belanja daerahnya kepada dana perimbangan, sehingga mampu menciptakan kemandirian daerah. Hal ini dimungkinkan mengingat potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar dan dapat dikembangkan serta menjanjikan sumber-sumber penerimaan yang besar, baik itu pajak dan retribusi

daerah maupun pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Holtz-Eakin, *et al.* (1985) yang menunjukkan adanya keterikatan yang erat antara transfer pemerintah pusat dengan belanja daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi berupaya memaksimalkan belanja tetapi di sisi lain juga mengimbangi optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini memberikan sinyal bahwa pemerintah provinsi produktif dalam mengalokasikan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah yang diproksi dengan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2014. Pendapatan asli daerah yang diproksi dengan *herfindahl concentration taxes* berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2014. Dana perimbangan yang diproksi dengan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2014. Dana perimbangan yang diproksi dengan dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2014. Dana perimbangan yang diproksi dengan dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2014. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif dan tidak signifikan pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-

2014. Produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan tidak signifikan pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2014. Tidak terjadi ilusi fiskal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2014.

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan adalah penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih fokus meneliti adanya kemungkinan terjadinya ilusi fiskal pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali agar terlihat jelas kabupaten/kota mana saja yang terdeteksi terjadi ilusi fiskal, khususnya kabupaten/kota yang potensi pengumpulan PAD nya masih rendah seperti Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan, Bangli, Klungkung, dan Karangasem. Pemerintah pusat diharapkan untuk berupaya lebih memahami secara spesifik kapasitas fiskal di daerah agar kemudian daerah tidak dapat memanfaatkan kekurang pahaman pemerintah pusat tersebut untuk meningkatkan kebutuhan fiskalnya dalam rangka untuk memperoleh besarnya dana perimbangan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menghitung potensi pendapatan masing-masing daerah.

## REFERENSI

- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa- Bali). Paper disajikan pada *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Adi, Priyo Hari. 2007. Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi. *The 1st National Accounting Conference*. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Adi, Priyo Hari. 2009. Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.6, No.1.

- Akai, N. and Sakata, M. 2002. Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence form State-Level Cross-Section Data for the United States. *Journal of Urban Economics*, Vol.52, pp: 93-108.
- Alamri, Rosa. 2015. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil PPengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten-Kota Di Provinsi Gorontalo). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo*.
- Aramana, Desi. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel moderating pada Provinsi Sumatera Utara. *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Dollery, Brian dan Andrew Worthington. 1996. The Empirical Analysis of Fiscal Illusion. *Journal of Economic Surveys*, pp: 261-297.
- Dollery, Brian dan Andrew Worthington. 1999. Fiscal Illusion and The Australian Local Government Grants Process: How Sticky is the Flypaper Effect. *Kluwer Academic Publishers*. Public Choise 99, pp: 1-13.
- Gemmel, N., Oliver Morrissey dan Abuzer Pinar. 1998. Fiscal Illusion and The Demand for Local Government Expenditures in England and Wales. *School of Economic Discussion Paper 98/19*.
- Ghamkar, Shama dan Wallace Oates. 1996. Asymetries in the Response to Increases and Decreases in Governmental Grants: Some Empirical Evidence. *National Tax Journal*, pp: 510-512.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Paper disajikan pada *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar.
- Harjiyanti, Nur. 2015. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2013). *Jurnal Akuntansi*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Hayek, Friedrich. 1945. The Use of Knowledge in Society. *American Economic Review*, 35, pp: 519-530.
- Hewitt, Daniel dan Dennis R. Heffley. 1989. Unfolding the Flypaper: The Effects of Intergovernmental Grants in an Open Local Economy. *IMF Working Paper No. 89/58*.

- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S. Rosen dan Schuyler Tilly. 1985. Intertemporal Analysis of State and Local Government Spending: Theory and Test. *Journal of Urban Economics*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Logan, R. R.. 1986. Fiscal Illusion and The Grantor Government. *Journal of Political Economy*.
- Maggi, Eva Maria dan Ladurner, Ulrich. 2009. Federal Features and Financial Decentralization. *Inhouse Seminar*. Eurac Research.
- Nagathan dan K. J. Sivagnanan. 1999. Federal Transfer and Tax Effort of States in India. *Indian Economic Journal*.
- Nahlia, Fera. 2014. Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2007-2012. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Nanga, Muana. 2005. Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT: Adakah Posisi Fiskal Pasca Otda Lebih Baik?. *Jurnal Kritis*. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Picur, Ronald D.. 2003. CFO as Budget Magician: Fiscal Illusion in Public Finance. *Government Finance Review*.
- Purbayu, Budi Santosa. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol.2, No.1, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Putra, Ida Bagus Dwi. 2015. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E Journal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 13.3 Desember (2015).
- Poesoro, Adri. 2008. Mekanisme Penetapan Alokasi DAK. *Laporan Penelitian*. Lembaga Penelitian SMERU, <http://www.smeru.or.id>.
- Rizki I. P., Arda. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah. (Studi Kasus pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat). *Skripsi*. Telkom University, Bandung.
- Rusydi, Bahrul Ulum. 2010. Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi di Indonesia tahun

- 2005-2008). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Setiawan, Dian. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Sidik, Machfud, Djoko Hidayanto, Tjip Ismail, Kadjatmiko, Arlen Tobana Pakpahan dan Adriansyah. 2004. Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal.
- Siregar, Hara Rizky. 2012. Analisis Determinan dan Deteksi Ilusi Fiskal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tiebout, Charles M. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), pp: 416-424.
- Tanzi, Vito. 1972. Tax Payer Choice in Future Tax Shifts. *Tax Review*. Vol. XXXIII, No.11, pp: 75-88.
- Yunus, Ririn A., 2015. Pengaruh Dana Perimbangan dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009-2013. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo*.
- Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3, pp: 799-816.
- Wuriasih, Anik. 2013. Mendeteksi Timbulnya Ilusi Fiskal dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Universitas Negeri Papua Manokwari.